



Laporan Realisasi Anggaran

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD TA. 2023
DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	PENDAPATAN DAERAH					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pajak Daerah		-	-	-	-
4	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		-	-	-	-
5	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		-	-	-	-
6	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		-	-	-	-
7	Pajak Air Permukaan		-	-	-	-
8	Pajak Rokok		-	-	-	-
9	Retribusi Daerah		5.400.000.000,00	4.673.782.700,00	86,55	4.419.443.200,00
10	Retribusi Jasa Umum		-	-	-	-
11	Retribusi Jasa Usaha		4.959.875.000,00	4.318.257.700,00	87,06	3.924.343.200,00
12	Retribusi Perizinan Tertentu		440.125.000,00	355.525.000,00	80,78	495.100.000,00
13	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		-	-	-	-
14	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN		-	-	-	-
15	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD		-	-	-	-
16	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta		-	-	-	-
17	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		22.500.000.000,00	27.536.588.941,00	122,38	22.479.136.136,00
18	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-	-	-
19	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-	-	-
20	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-	-	-
21	Hasil Kerja Sama Daerah		-	-	-	-
22	Jasa Giro		-	-	-	-
23	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		-	-	-	-
24	Pendapatan Bunga		-	-	-	-
25	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah		-	-	-	-
26	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		22.500.000.000,00	27.460.516.091,00	122,05	22.409.202.336,00
27	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing		-	-	-	-
28	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		-	-	-	-
29	Pendapatan Denda Pajak Daerah		-	-	-	-
30	Pendapatan Denda Retribusi Daerah		-	76.072.850,00		69.933.800,00
31	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		-	-	-	-
32	Pendapatan dari Pengembalian		-	-	-	-
33	Pendapatan BLUD		-	-	-	-
34	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan		-	-	-	-
35	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		-	-	-	-
36	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		-	-	-	-
37	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)		-	-	-	-
38	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		-	-	-	-
39	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf		-	-	-	-
40	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		27.900.000.000,00	32.210.371.641,00	115,45	26.898.579.336,00
41						
42	PENDAPATAN TRANSFER					
43	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		-	-	-	-
44	Dana Perimbangan		-	-	-	-
45	Dana Insentif Daerah (DID)		-	-	-	-
46	Pendapatan Transfer Antar Daerah		-	-	-	-
47	Pendapatan Bagi Hasil		-	-	-	-
48	Bantuan Keuangan		-	-	-	-
49	Jumlah Pendapatan Transfer		-	-	-	-
50						
51	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
52	Pendapatan Hibah		-	-	-	-
53	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat		-	-	-	-
54	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-
55	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri		-	-	-	-
56	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri		-	-	-	-
57	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis		-	-	-	-
58	Dana Darurat		-	-	-	-
59	Dana Darurat		-	-	-	-
60	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-	-	-
61	Lain-lain Pendapatan		-	-	-	-
62	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		-	-	-	-
63	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah		-	-	-	-
64						
65	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		27.900.000.000,00	32.210.371.641,00	115,45	26.898.579.336,00
66						
67	BELANJA DAERAH					
68	BELANJA OPERASI					
69	Belanja Pegawai		42.913.593.000,00	41.829.436.160,00	97,47	40.331.961.685,00
70	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		19.667.471.000,00	19.004.726.240,00	96,63	19.488.459.540,00
71	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		22.527.112.000,00	22.164.609.920,00	98,39	20.181.392.145,00
72	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		719.010.000,00	660.100.000,00	91,81	662.110.000,00
73	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD		-	-	-	-

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
74	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH		-	-		-
75	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH		-	-		-
76	Belanja Gaji dan Tunjangan MRP		-	-		-
77	Belanja Pegawai BOS		-	-		-
78	Belanja Pegawai BLUD		-	-		-
79	Belanja Barang dan Jasa		136.144.370.000,00	133.516.602.848,00	98,07	118.927.882.569,00
80	Belanja Barang		3.931.685.000,00	3.798.782.509,00	96,62	2.600.978.178,00
81	Belanja Jasa		119.687.739.000,00	117.552.035.966,00	98,22	105.472.731.451,00
82	Belanja Pemeliharaan		5.439.550.000,00	5.237.158.303,00	96,28	4.872.685.940,00
83	Belanja Perjalanan Dinas		7.067.396.000,00	6.910.626.070,00	97,78	5.963.487.000,00
84	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	18.000.000,00
85	Belanja Barang dan Jasa BOP		-	-		-
86	Belanja Barang dan Jasa BOS		-	-		-
87	Belanja Barang dan Jasa BLUD		-	-		-
88	Belanja Bunga		-	-		-
89	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		-	-		-
90	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain		-	-		-
91	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-		-
92	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-		-
93	Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)		-	-		-
94	Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD		-	-		-
95	Belanja Subsidi		-	-		-
96	Belanja Subsidi kepada BUMN		-	-		-
97	Belanja Subsidi kepada BUMD		-	-		-
98	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta		-	-		-
99	Belanja Subsidi kepada Koperasi		-	-		-
100	Belanja Hibah		-	-		-
101	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat		-	-		-
102	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-		-
103	Belanja Hibah kepada BUMN		-	-		-
104	Belanja Hibah kepada BUMD		-	-		-
105	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		-	-		-
106	Belanja Hibah Dana BOS		-	-		-
107	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		-	-		-
108	Belanja Bantuan Sosial		-	-		-
109	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu		-	-		-
110	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga		-	-		-
111	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat		-	-		-
112	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)		-	-		-
113	Jumlah Belanja Operasi		179.057.963.000,00	175.346.039.008,00	97,93	159.259.844.254,00
114						
115	BELANJA MODAL					
116	Belanja Modal Tanah		-	-		-
117	Belanja Modal Tanah		-	-		-
118	Belanja Modal Tanah BLUD		-	-		-
119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		7.229.741.000,00	7.109.875.570,00	98,34	1.978.990.450,00
120	Belanja Modal Alat Besar		-	-		-
121	Belanja Modal Alat Angkutan		-	-		-
122	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur		-	-		-
123	Belanja Modal Alat Pertanian		-	-		-
124	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		450.500.000,00	407.150.000,00	90,38	91.095.000,00
125	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		105.000.000,00	104.795.000,00	99,80	-
126	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan		-	-		-
127	Belanja Modal Alat Laboratorium		-	-		-
128	Belanja Modal Alat Persenjataan		-	-		-
129	Belanja Modal Komputer		302.000.000,00	300.000.000,00	99,34	32.615.000,00
130	Belanja Modal Alat Eksplorasi		12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	-
131	Belanja Modal Alat Pengeboran		-	-		-
132	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian		-	-		-
133	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi		-	-		-
134	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja		-	-		-
135	Belanja Modal Alat Peraga		-	-		-
136	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi		-	-		-
137	Belanja Modal Rambu-rambu		6.360.241.000,00	6.285.930.570,00	98,83	1.855.280.450,00
138	Belanja Modal Peralatan Olahraga		-	-		-
139	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS		-	-		-
140	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD		-	-		-
141	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		14.117.651.000,00	14.011.977.015,00	99,25	6.240.007.235,00
142	Belanja Modal Bangunan Gedung		14.117.651.000,00	14.011.977.015,00	99,25	6.240.007.235,00
143	Belanja Modal Monumen		-	-		-
144	Belanja Modal Bangunan Menara		-	-		-
145	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti		-	-		-
146	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD		-	-		-
147	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-		-
148	Belanja Modal Jalan dan Jembatan		-	-		-
149	Belanja Modal Bangunan Air		-	-		-
150	Belanja Modal Instalasi		-	-		-
151	Belanja Modal Jaringan		-	-		-
152	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD		-	-		-
153	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		200.000.000,00	198.717.750,00	99,36	-
154	Belanja Modal Bahan Perpustakaan		-	-		-
155	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga		-	-		-
156	Belanja Modal Hewan		-	-		-
157	Belanja Modal Biota Perairan		-	-		-
158	Belanja Modal Tanaman		-	-		-
159	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya		-	-		-

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
160	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi		-	-		-
161	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		200.000.000,00	198.717.750,00	99,36	-
162	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS		-	-		-
163	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD		-	-		-
164	Belanja Modal Aset Lainnya		-	-		-
165	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud		-	-		-
166	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD		-	-		-
167	Jumlah Belanja Modal		21.547.392.000,00	21.320.570.335,00	98,95	8.218.997.685,00
168						
169	BELANJA TAK TERDUGA					
170	Belanja Tidak Terduga		-	-		-
171	Belanja Tidak Terduga		-	-		-
172	Jumlah Belanja Tidak Terduga		-	-		-
173						
174	BELANJA TRANSFER					
175	Belanja Bagi Hasil		-	-		-
176	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa		-	-		-
177	Belanja Bantuan Keuangan		-	-		-
178	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi		-	-		-
179	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota		-	-		-
180	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota		-	-		-
181	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi		-	-		-
182	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		-	-		-
183	Jumlah Belanja Transfer		-	-		-
184						
185	JUMLAH BELANJA DAERAH		200.605.355.000,00	196.666.609.343,00	98,04	167.478.841.939,00
186						
187	SURPLUS/DEFISIT		(172.705.355.000,00)	(164.456.237.702,00)	95,22	(140.580.262.603,00)
188						
189	PEMBIAYAAN DAERAH					
190	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH					
191	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		-	-		-
192	Pelampauan Penerimaan PAD		-	-		-
193	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer		-	-		-
194	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		-	-		-
195	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan		-	-		-
196	Penghematan Belanja		-	-		-
197	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan		-	-		-
198	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan		-	-		-
199	Sisa Belanja Lainnya		-	-		-
200	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD		-	-		-
201	Pencairan Dana Cadangan		-	-		-
202	Pencairan Dana Cadangan		-	-		-
203	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-		-
204	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)		-	-		-
205	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		-	-		-
206	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-		-
207	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat		-	-		-
208	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain		-	-		-
209	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-		-
210	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-		-
211	Pinjaman Daerah dari Masyarakat		-	-		-
212	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	-		-
213	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat		-	-		-
214	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-		-
215	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD		-	-		-
216	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN		-	-		-
217	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi		-	-		-
218	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat		-	-		-
219	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD		-	-		-
220	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-		-
221	Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD		-	-		-
222	Divestasi BLUD		-	-		-
223	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		-	-		-
224						
225	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH					
226	Pembentukan Dana Cadangan		-	-		-
227	Pembentukan Dana Cadangan		-	-		-
228	Penyertaan Modal Daerah		-	-		-
229	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)		-	-		-
230	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		-	-		-
231	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		-	-		-
232	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat		-	-		-
233	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain		-	-		-
234	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-		-
235	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-		-
236	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat		-	-		-
237	Pemberian Pinjaman Daerah		-	-		-
238	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat		-	-		-
239	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-		-
240	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD		-	-		-

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
241	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN		-	-		-
242	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi		-	-		-
243	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat		-	-		-
244	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada BLUD		-	-		-
245	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-		-
246	Pinjaman BLUD		-	-		-
247	Investasi BLUD		-	-		-
248	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		-	-		-
249						
250	PEMBIAYAAN NETTO		-	-		-
251						
252	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(172.705.355.000,00)	(164.456.237.702,00)	95,22	(140.580.262.603,00)

* Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

